BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya kerugian, selain dalam bidang kesehatan juga bidang sosial dan ekonomi terdampak. Salah satunya dalam bidang sosial yaitu tingginya kasus perceraian di Kabupaten Bandung yang begitu melonjak. Panitera Muda gugatan pengadilan Agama Soreang yaitu Ahmad Sadikin membenarkan hal tersebut dan menurut beliau rata-rata setiap hari banyaknya gugatan perceraian ibu muda bahkan dalam 1 hari terdapat 150 gugatan perceraian sehingga salah satu faktor yang diduga perceraian adalah pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.

Pernikahan dini di Kabupaten Bandung ternyata mengalami pelonjakan. Angka pernikahan usia dini di Kabupaten Bandung yang terus meningkat setiap tahun, tercatat pada tahun 2020 Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung setiap bulannya menerima pengajuan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur sebanyak 465 ajuan dispensasi nikah, sesuai dengan pasal 2 Ayat (2) menyebutkan, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Menurut Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Dr. Susilowati Suparto, M.H., peningkatan angka pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 salah satunya akibat masalah ekonomi. Kehilangan mata pencaharian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga. “Para pekerja yang juga orang tua tersebut seringkali mengambil alternatif jalan pintas dengan menikahkan anaknya pada usia dini karena dianggap dapat meringankan beban keluarga”, ungkap Susilowati dalam webinar Dispensasi Nikah pada Masa Pandemi Covid-19.

Pernikahan dini dianggap sebuah kesalahan karena tidak sesuai dengan program BKKBN yaitu “21 25 keren”, dan tidak sesuai dengan UU Perkawinan. UU Perkawinan yang semula pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas

umur untuk menikah baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Sementara usia 16 tahun itu masih dalam kategori usia anak, sehingga usia anak ini harus terlindungi dan menjamin segala hak kebutuhan pada anak, jika usia anak memasuki pernikahan maka hak anak tersebut akan hilang, dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sehingga Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi UU no 19 tahun 2019. Menurut UU No. 19 tahun 2019 batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Dalam UU Perkawinan ini memang hal yang sangat menyoroti adalah usia, jika mengacu pada perlindungan anak maka batas usia anak yaitu 18 tahun dan masih menjadi pertanggung jawaban orang tua atas dasar kehidupannya. Dalam UU Perkawinan mengalami perubahan yang semula batas perkawinan adalah 16 tahun menjadi 19 tahun, di antara batas usia perlindungan anak dengan pernikahan tidak beririsan satu sama lain sehingga usia anak hingga 18 tahun terjamin atas hak-hak yang seharusnya diberikan.

Namun menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) umur ideal menikah untuk perempuan yaitu 21 tahun. Sementara umur ideal laki-laki yaitu 25 tahun. Usia dari sepasang calon pengantin ini dianggap ideal karena dalam usia 21 tahun wanita terdapat kesiapan yang sudah matang diantaranya kesiapan mental juga cukupnya pendidikan begitu pula dengan laki-laki yang menikah pada usia 25 tahun yang dipandang cukup dalam mental, pendidikan dan penghasilan.

Beberapa alasan terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia ini adalah status sosial dan ekonomi yang rendah, adanya budaya kawin usia dini, perkawinan yang dipaksa dan seks bebas (BKKBN, 2012). Perkawinan usia dini ini juga difaktori oleh perjodohan, agama, tuntutan keluarga, tekanan sosial, kemauan sendiri dan pendidikan. Adanya persepsi masyarakat bahwa menikah lebih cepat dapat melepaskan beban dan masalah menjadi salah satu faktornya.

Hasil wawancara dengan Kasi Remaja DP2KBP3A Ibu Diah bahwa pernikahan dini kerap terjadi setiap tahunnya, alasan yang kerap terjadi dari masalah ekonomi hingga pergaulan bebas sehingga kurangnya persiapan dalam kehidupan berkeluarga karena banyak di antaranya yang menikah atas dasar tergesa-gesa untuk meringankan beban dan kecelakaan seperti hamil di luar pernikahan. Beberapa program sudah digencarkan untuk mengantisipasi angka pernikahan dini di Kabupaten Bandung salah satunya program Generasi Berencana untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja namun tetap saja angka pernikahan dini cukup tinggi. Salah satu penyumbang terbesar angka pernikahan di bawah usia 19 tahun ini diantaranya seperti Kecamatan Baleendah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung tahun 2017, Kecamatan Baleendah merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki penduduk terpadat nomor 1 di Kabupaten Bandung, dan berdasarkan data KUA Kecamatan Baleendah juga terdapat kasus angka pernikahan dini yang cukup tinggi di tahun 2016 yaitu ada 183 yang menikah di bawah usia 19 tahun.

Menjalankan sebuah pernikahan tidak hanya kesiapan fisik saja yang harus diperhatikan, salah satunya adalah kesiapan mental atau emosional dalam diri. Sehingga perlunya banyak kesiapan untuk menjalankan rumah tangga (Apriliani & Nurwati, 2020). Kesiapan menikah adalah keyakinan individu mengenai dirinya yang telah atau belum siap untuk menikah (Bustan 2015, hlm. 3). Semakin dini kesiapan menikah dilakukan, semakin siap individu menghadapi pernikahan. Artinya perlunya adanya perencanaan atau kesiapan agar tidak timbulnya permasalahan dalam sebuah keluarga. Permasalahan dalam sebuah keluarga dapat memicu sebuah perceraian artinya ketahanan dalam sebuah keluarga perlu dibangun untuk menghindari dari sebuah perceraian.

Masalah kesiapan menikah menjadi prasyarat awal bagaimana kelak calon pasangan akan menjalankah bahtera rumah tangganya. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian terdahulu oleh Apriliani & Nurwati, (2020) menjelaskan pengaruh perkawinan usia muda terhadap ketahanan keluarga yaitu dimana usia muda belum memiliki kerentanan dalam sisi psikologi, mental serta emosi yang belum stabil sehinga menyebabkan ketahanan keluarga menjadi keropos dan rentan terjadi perceraian. Ulin Na'mah,(2016) mengemukakan untuk membangun kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah agar membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas.

Menurut Prof. Dr. Ir Euis Sunarti ketahanan keluarga menegaskan bahwa “Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga, dengan nilai yang dianut dan tujuan yang ingin dicapai, mengelola sumber daya dan masalah atau tekanan keluarga, agar memperoleh kehidupan keluarga yang sejahtera dan berkualitas” (Euis Sunarti, 2021: 3). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mempertahankan bahtera rumah tangga dengan hasil yang berkualitas.

Membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga terdapat faktor pendukung, salah satunya adalah kesiapan menikah (Sunarti, 2018).. Dalam penjelasan di atas menunjukkan bahwa kesiapan menikah merupakan salah faktor untuk membangun ketahanan keluarga.

Membangun ketahanan keluarga merupakan salah satu aspek penting pranata sosial yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pembangunan sosial (Herlina, 2018). Dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga merupakan pondasi dalam keberlanjutan pembangunan. Hal tersebut berarti sebagai elemen mikro dalam tatanan kehidupan masyarakat maka hal utama yang dapat disentuh untuk pembangunan nasional adalah keluarga.

Pentingnya mengetahui bagaimana ketahanan keluarga yang dimaksudkan adalah untuk dapat meningkatkan pembangunan nasional di Kecamatan Baleendah. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis bermaksud akan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Kesiapan Menikah dengan Ketahanan Keluarga” (Studi Pada Keluarga Menikah Usia Dini di Kecamatan Baleendah).

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menentukan sebuah rumusan masalah, peneliti mengidentifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung tahun 2020 sebanyak 465 ajuan dispensasi nikah.
2. Berdasarkan data lapangan yang ditemukan Kecamatan Baleendah merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki penduduk terpadat nomor 1 di Kabupaten Bandung, dan juga terdapat kasus angka pernikahan dini yang cukup tinggi di tahun 2016 yaitu ada 183 yang menikah di bawah usia 19 tahun.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Remaja DP2KBP3A Ibu Diah bahwa pernikahan dini kerap terjadi setiap tahunnya, alasan yang kerap terjadi dari masalah ekonomi hingga pergaulan bebas sehingga kurangnya persiapan dalam kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan identifikasi yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana kesiapan menikah pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Baleendah?
2. Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Baleendah ?
3. Bagaimana hubungan kesiapan menikah dengan ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Baleendah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesiapan menikah pada pasangan pernikahan dini ?
2. Untuk mengetahui ketahanankeluarga pada pasangan pernikahan dini?
3. Untuk mengetahui hubungan kesiapan menikah dengan ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan wawasan dalam Pendidikan Masyarakat. Hal ini berkaitan dengan cara membelajarkan masyarakat melalui ketahanan keluarga atau mempersiapkan diri menuju pernikahan.

1.5 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan pegangan dalam menentukan kebijakan ke depan untuk menentukan program bagi pasangan menikah yang diberikan oleh BKKBN untuk mengatasi berbagai problematika pernikahan.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI 2019. Berikut susunan atau bahasan yaitu :

- BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat, signifikansi penelitian dan struktur organisasi.
- BAB II Kajian Pustaka menjelaskan atau mendeskripsikan konsep kesiapan menikah dan Ketahanan Keluarga
- BAB III Metode Penelitian menjelaskan dan menguraikan tentang desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrument penelitian, prosedur penelitian dan analisis data.
- BAB IV Temuan dan Bahasan, bab ini mendeskripsikan temuan penelitian dan pembahasan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah di uraikan sebelumnya oleh peneliti.
- BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi menjelaskan tentang simpulan mengenai hasil penelitian, menguraikan tentang penafsiran dan pemaknaan, serta

rekomendasi yang dapat di sajikan untuk lembaga maupun peneliti selanjutnya.